



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	:	5 (Lima)
Tahun Sidang	:	2023-2024
Masa Persidangan	:	IV
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN RI
Hari, Tanggal	:	Selasa, 19 Maret 2024
Pukul	:	10.30 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka.
Pimpinan Rapat	:	Aria Bima/Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	:	Pembahasan mengenai : 1. Kinerja BUMN. 2. Progress Restrukturisasi BUMN. 3. Perubahan Peruntukan PMN Utama Karya Tahun Anggaran 2024 Periode I; 4. Konsultasi Rencana Privatisasi/ <i>right issue</i> PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk; dan 5. Lain-lain.
Hadir	:	1. 27 Orang dari 55 Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Menteri BUMN RI, Bapak Erick Thohir; Beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib yang tertuang dalam Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 276 ayat (1), maka Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN RI pada Pukul 11.22 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada hari Selasa, 19 Maret 2024, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Bapak Aria Bima.

II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI memberikan apresiasi atas kinerja Kementerian BUMN yang berhasil mengkonsolidasikan laba BUMN sebesar Rp292 triliun (unaudited) dan memberikan dividen pada tahun 2023 sebesar Rp81,2 triliun.
2. Komisi VI DPR RI telah menerima penjelasan atas kinerja BUMN serta rencana usulan dividen tahun anggaran tahun 2024, usulan PMN TA 2024, dan usulan PMN TA 2025.
3. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Kementerian BUMN dan untuk selanjutnya akan mendalami usulan PMN TA 2024 yang berasal dari Alokasi Pembiayaan Cadangan Investasi APBN 2024, dengan rincian sbb:
 - a. PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp 2 Triliun dalam rangka pengadaan kereta melalui retrofit dan pembelian kereta baru
 - b. PT Utama Karya (Persero) sebesar Rp 1,6 Triliun dalam rangka penyelesaian ruas tol Palembang – Betung
 - c. PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) sebesar Rp 1 Triliun dalam rangka penguatan permodalan
 - d. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sebesar Rp 3 Triliun dalam rangka pembelian kapal penumpang untuk rute perintis
 - e. PT Industri Kereta Api (Persero) sebesar Rp 2 Triliun dalam rangka peningkatam kapasitas dan kualitas produksi
 - f. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebesar Rp 1 Triliun dalam rangka penguatan permodalan
 - g. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)/IFG sebesar Rp 3 Triliun dalam rangka penguatan permodalan penjaminan KUR
4. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Kementerian BUMN dan untuk selanjutnya akan mendalami usulan PMN TA 2025 dari Kementerian BUMN dan akan dibahas dalam masa persidangan berikutnya.
5. Komisi VI DPR RI menyetujui perubahan alokasi PMN Tunai TA 2024 PT Utama Karya (Persero) sebesar Rp 18,604 Triliun yang akan digunakan untuk pelaksanaan penugasan dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Tahap I yang mengalami perubahan dari Rp 6,104 Triliun menjadi Rp 5,177 Triliun

- Pembangunan Ruas Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung yang berubah dari Rp 10 Triliun menjadi Rp 13,427 Triliun
6. Komisi VI DPR RI menyetujui aksi korporasi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk melakukan *rights issue* sesuai dengan persetujuan PMN TA 2024 sebesar Rp 6 Triliun.
 7. Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian BUMN untuk segera mengambil langkah-langkah konkret dalam permasalahan yang ada di PT. Taspen.
 8. Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian BUMN untuk memberikan laporan evaluasi penggunaan dana PMN.
 9. Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian BUMN untuk mensinergikan dan mengoptimalkan BUMN pangan, seperti PT. Rajawali Nusantara Indonesia (RNI)/ID FOOD, PT. Pupuk Indonesia (persero), PT. Perkebunan Nusantara dan Perum BULOG untuk berperan lebih dalam mengatasi krisis pangan dan menjaga kedaulatan pangan.
 10. Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian BUMN untuk mengevaluasi dan terus meningkatkan program listrik perdesaan PT. PLN (Persero).
 11. Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian BUMN untuk berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lainnya terkait penyelesaian kredit macet UMKM melalui kebijakan hapus buku dan hapus tagih.
 12. Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian BUMN agar berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lainnya terkait kelangkaan gas industri untuk mencegah terjadinya deindustrialisasi.
 13. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian BUMN RI untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada Pukul 15.10 WIB.

MENTERI BUMN RI

Ttd.

ERICK THOHIR

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**

Ttd.

**ARIA BIMA
A-189**